



PERAN SEKTOR TRANSPORTASI DALAM MAKING INDONESIA 4.0

**PRESIDEN RI
TELAH MELUNCURKAN ROAD MAP
MAKING INDONESIA 4.0**

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;**
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;**
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;**
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2008 tentang Unit Kliring Data dan Informasi Bidang Transportasi;**
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2011 tentang Alur Dan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.**

GAMBARAN UMUM KEGIATAN PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA

TUJUAN



STANDAR
REFERENSI
BASIS DATA
GEO-PORTAL

MANFAAT

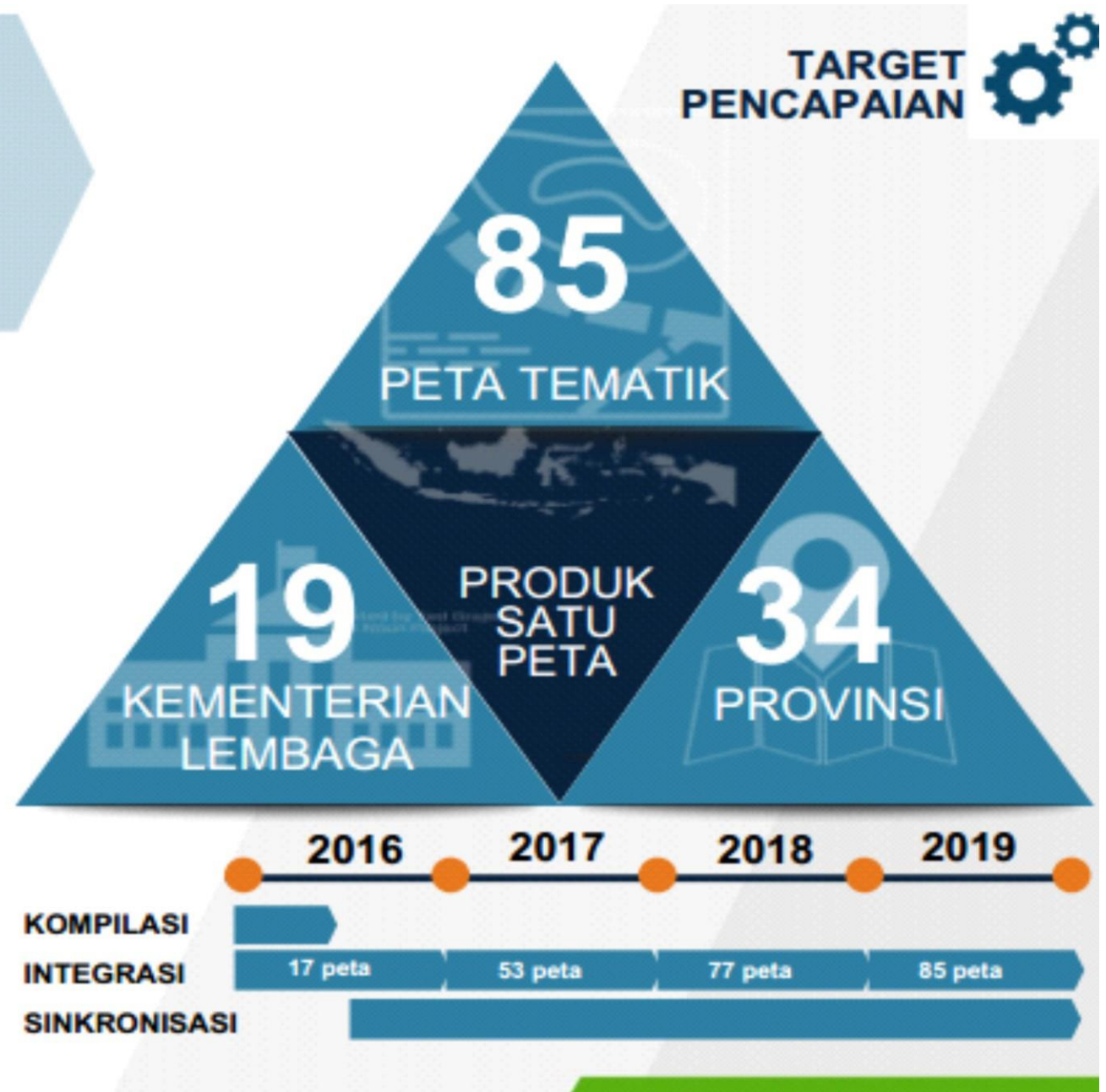
SEBAGAI ACUAN UNTUK:

- Acuan Perbaikan Data Spasial
- Akurasi Perencanaan Tata Ruang
- Akurasi dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

KEGIATAN

- 1 KOMPILASI**
Pengumpulan peta tematik oleh K/L
- 2 INTEGRASI**
Superimpose peta tematik di atas Peta RBI 1:50.000
- 3 SINKRONISASI**
Penyelesaian isu terkait tumpang tindih peta

TARGET
PENCAPAIAN



KEBIJAKAN DEREGULASI & DIGITALISASI PERIZINAN MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

1 DEREGULASI SEKTOR PERHUBUNGAN

2 SISTEM PERIZINAN ONLINE

SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT (VTA & SPIONAM)

SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT (SIMLALA, INAPORTNET, PELAUT ONLINE, BUKU PELAUT & SERTIFIKAT)

SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA (AOL, PAS BANDARA, PENERBANGAN, PERIZINAN KEAMANAN PENERBANGAN)

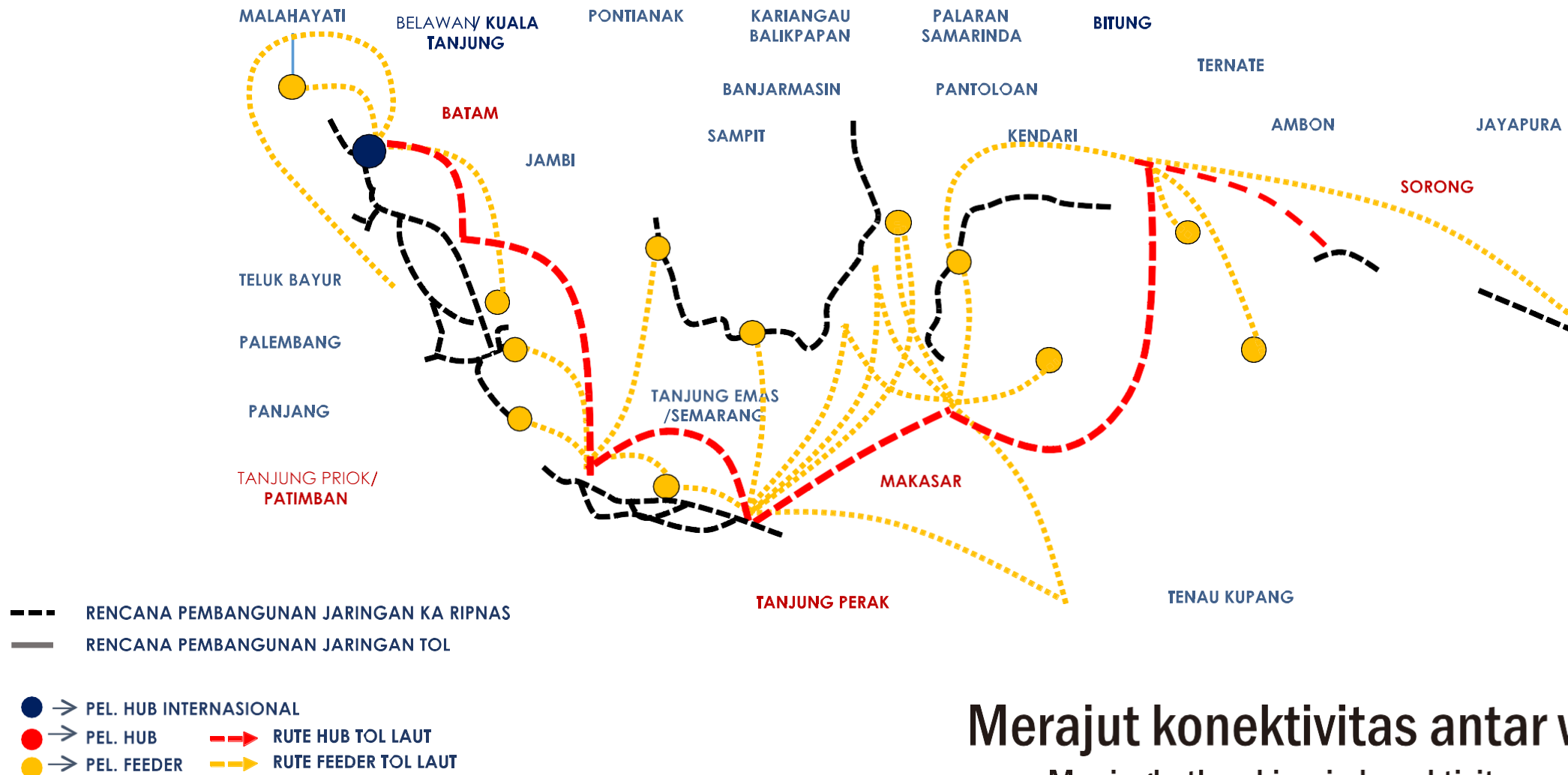
TRANSPORTASI PERKOTAAN (ANGKUTAN SEWA KHUSUS)

INTEGRASI SISTEM PELAYANAN
INFORMASI DAN PERIZINAN
INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

Perizinan Melalui
Online Single Submission (OSS)
KA : 4, Darat : 9
Laut : 25, Udara : 72

PERKUALIFIKASI JALUR LOGIS AMA

Merajut konektivitas antar wilayah untuk memantapkan perekonomian regional



Sumber : Kementerian Perhubungan, Laporan 3 Tahun JKW-JK, KSP, 2017

Merajut konektivitas antar wilayah

Meningkatkan kinerja konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah

SIMPULAN

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI SEKTOR TRANSPORTASI

- a. Dasar Hukum**
- b. One Map Policy**
- c. Online Single Submission untuk Perijinan**
- d. Kemudahan penggunaan**
 - 1. Pemesanan tiket**
 - 2. Check in dan Boarding**
 - 3. Pengoperasian dan pemantauan sarana transportasi**
 - 4. Pengelolaan bagasi/cargo**
 - 5. Kondisi lalu lintas**
 - 6. Aksesibilitas, koneksitas**
- e. Terkait transparansi informasi dan biaya logistik**
- f. Harus memiliki komitmen dan tujuan yang sama: regulator, operator dan user**

TERIMAKASIH